



ASTRONOT SHENZHOU-16 KELUAR DARI KAPSUL KEMBALI

Astronot Jing Haipeng keluar dari kapsul kembali pesawat ruang angkasa berawak Shenzhou-16 di lokasi pendaratan Dongfeng di Daerah Otonomi Mongolia Dalam, Tiongkok, Selasa (31/10). Kapsul kembali tersebut membawa astronot Jing Haipeng, Zhu Yangzhu dan Gui Haichao, mendarat di lokasi pendaratan Dongfeng di Daerah Otonomi Mongolia Dalam Tiongkok.

Gelombang Boikot Israel Semakin Beragam dan Menyebar di Seluruh Dunia

Merek-merek yang memiliki hubungan dengan Israel ramai-ramai diboikot.

GAZA (IM) - Muncul di media sosial tagar #BDSMovement yang merupakan gerakan untuk memboikot, melakukan divestasi, dan memberikan sanksi kepada Israel. Upaya ini membuat para pengguna akun menyebut merek-merek yang memiliki hubungan dengan Israel dan menyerukan boikot.

Salah satu yang ramai menjadi sasaran adalah McDonald's setelah sebuah lokasi di Israel menawarkan makanan gratis untuk militer. Beberapa di antaranya memboikot Starbucks setelah perusahaan tersebut mengugut serikat pekerja pada bulan ini atas akun media sosial serikat pekerja, yang mengunggah dukungan untuk warga Palestina.

BDS ini, menurut VOX, merupakan gerakan protes non-kekerasan global.

Mereka berupaya menggunakan boikot ekonomi dan budaya terhadap Israel, dipadukan dengan aksi politik, dan sanksi pemerintah untuk menekan pemerintah Israel agar mematuhi hukum internasional dan mengakhiri kebijakan kontroversialnya terhadap Palestina.

Tindakan ini adalah sebuah taktik, bukan sebuah organisasi, sehingga kelompok-kelompok yang berbeda melakukan kampanye sendiri yang mungkin berfokus pada serangkaian target yang sedikit berbeda. Namun satu kesamaan dari taktik ini adalah semuanya memiliki landasan moral dan menggunakan perlawanan yang damai.

BDS mengambil inspirasi langsung dari perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan dan gerakan hak-hak sipil AS, yang keduanya secara efektif

menggunakan boikot. Aktivis anti-apartheid di Afrika Selatan, Uskup Agung Desmond Tutu, adalah pembela gerakan BDS yang bersemangat, dan menyebut persamaan antara apartheid di Afrika Selatan dan Israel sangat mencolok.

Boikot yang dilakukan BDS tidak hanya mencakup produk dan perusahaan Israel, seperti SodaStream. Perusahaan rakas non-Israel yang diyakini gerakan tersebut terlibat dalam penindasan terhadap warga Palestina pun masuk dalam BDS.

Contoh saja beberapa warga Maroko memutuskan untuk memboikot perusahaan dan institusi yang pro-Israel atau membuat pernyataan yang tidak bernada mengenai perjuangan Palestina. Mereka fokus pada pemboikotan jaringan ritel Prancis Carrefour, yang menandatangani kemitraan dengan Electra Consumer Products dan anak perusahaannya Yenot Bitan tahun lalu, keduanya beroperasi di pemukiman ilegal Israel.

Beberapa pemuda Maroko memperluas boikot mereka terhadap semua perusahaan yang mengunggah pesan permintaan maaf di media sosial atas "genosida Tel Aviv di Gaza". McDonald's, Starbucks, Pizza Hut, dan jaringan waralaba makanan anak muda adalah target utama kampanye yang sedang berlangsung. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai catatan memanfaatkan konflik untuk kepentingan humasnya.

Di negara lain pun melakukan hal yang sama. Warga Yordania memilih untuk memboikot merek-merek yang mendukung Israel dan menggalakkan kampanye "Dukungan Lokal".

Banyak perusahaan yang meluncurkan bursa kerja kecil, menawarkan peluang kerja bagi karyawan yang berisiko tinggi kehilangan pekerjaan atas gerakan itu.

Pengguna media sosial Faten Mousa mengatakan dikutip dari The Jordan Times, solidaritas ini memberikan semangat dan menunjukkan bahwa komunitas Yordania

menghargai persatuan dan tindakan kolektif. "Kampanye ini mewakili upaya sadar untuk membangun perekonomian lokal yang lebih kuat," kata Mousa.

Mousa menegaskan, jelas bahwa kampanye ini lebih dari sekedar pernyataan politik. Kampanye tersebut merupakan bukti ketahanan bangsa Yordania dan bukti kekuatan boikot yang dilakukan secara sadar.

Sedangkan di Inggris, sejarawan terkemuka menolak hadiah akademis Israel senilai ratusan ribu poundsterling. Profesor Catherine Hall dari University College London menolak penghargaan penelitian dengan menggambarkan keputusannya itu sebagai pilihan politik independen.

Ahli dalam sejarah kolonial ini seharusnya menerima hadiah dari Dan David Foundation dalam sebuah upacara di Tel Aviv pada 28 Oktober, tetapi dia menolak untuk hadir. Dia termotivasi untuk menolak penghargaan tersebut setelah berbicara dengan gerakan BDS. ● tom

meningkatkan dukungan mereka terhadap Israel. Pemerintah Israel belum secara resmi mengomentari kasus ini.

India memiliki hubungan cukup baik dengan Qatar. Doha merupakan pemasok utama gas alam ke India. Lebih dari dua pertiga dari 2,8 juta penduduk Qatar adalah pekerja migran, dan banyak dari mereka adalah warga negara India.

Sebagai sebuah negara di Timur Tengah, Qatar terbilang jarang melakukan eksekusi mati. Mereka sempat menyampaikan bahwa hukuman mati setara dengan hukuman seumur hidup. Menurut Amnesty International, terakhir kali Qatar melaksanakan eksekusi mati adalah pada 2020. Terpidana merupakan seorang pekerja migran asal Nepal.

Eksekusi mati terhadap pekerja migran Nepal itu dilakukan setelah Qatar tak melaksanakan jenis hukuman tersebut selama 20 tahun. ● ans

Pejabat Inggris Dipecat Usai Serukan Gencatan Senjata di Gaza

LONDON (IM) - Seorang anggota parlemen Inggris, Paul Bristow, yang juga menjabat sebagai pembantu menteri dipecat dari jabatannya setelah menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza. Pemerintah Inggris menyebut Bristow memberikan komentar yang tidak konsisten dengan tanggung jawab kolektif yang dipegang para pejabat pemerintahan.

Seperti dilansir BBC, Selasa (31/10), Bristow dalam suratnya kepada Perdana Menteri (PM) Rishi Sunak, pekan lalu, menyatakan bahwa 'gencatan senjata permanen' akan menyelamatkan nyawa dan memungkinkan bantuan kemanusiaan mencapai orang-orang yang paling membutuhkan.

Pemerintah Inggris diketahui mendukung 'jeda kemanusiaan', namun bukan gencatan senjata sepenuhnya di Jalur Gaza, yang terus digempur militer Israel untuk membalas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.

Saat acara berjudul 'Pertanyaan untuk Perdana Menteri' yang digelar bulan lalu, Sunak mengatakan bahwa 'jeda tertentu' akan memungkinkan lebih banyak bantuan masuk ke Jalur Gaza, namun dia menolak seruan untuk mendukung gencatan senjata dan menekankan Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri.

Bristow yang merupakan anggota parlemen dari Partai Konservatif untuk wilayah Peterborough ini, dipecat dari jabatannya sebagai Parliamentary Private Secretary (PPS) -- posisi terendah dalam jabatan kementerian -- untuk Sekretaris Negara untuk Ilmu Pengetahuan, Inovasi dan Teknologi, Michelle Donelan.

Setelah dipecat oleh Sunak, Bristow menuturkan kepada BBC bahwa dirinya bisa memahami keputusan sang PM Inggris. "Saya sepenuhnya memahami keputusan

PM. Dan dengan penyesalan, saya meninggalkan pekerjaan yang saya nikmati," ucapnya.

"Tapi sekarang saya bisa berbicara secara terbuka tentang suatu isu yang sangat dipedulikan oleh banyak konstituen saya," ujar Bristow.

"Saya meyakini bahwa saya bisa melakukan hal ini dengan lebih baik dari bangku belakang dibandingkan sebagai bagian dari pemerintah," tegasnya.

Kantor PM Inggris, atau yang biasa disebut Downing Street, menjelaskan dalam pernyataannya soal alasan pemecatan Bristow: "Paul Bristow telah diminta meninggalkan jabatannya di pemerintahan menyusul komentar yang tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab kolektif," demikian pernyataan Downing Street.

Tanggung jawab kolektif merupakan konvensi bahwa semua anggota pemerintahan harus secara terbuka mendukung kebijakan pemerintah, meskipun mereka secara pribadi tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

Sejumlah besar anggota parlemen oposisi mendukung seruan gencatan senjata di Jalur Gaza, namun sangat sedikit anggota parlemen dari Partai Konservatif -- yang kini berkuasa di Inggris -- yang mendukung seruan serupa.

Pemimpin Partai Buruh, partai oposisi Inggris saat ini, Sir Keir Starmer sedang berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk mendukung gencatan senjata sepenuhnya. Tokoh-tokoh senior Inggris, termasuk Wali Kota London Sadiq Khan dan pemimpin Partai Buruh Skotlandia Anas Sarwar, mendukungnya.

Namun Sir Kei sejauh ini hanya mendukung jeda kemanusiaan, dan hal itu menempatkannya dalam posisi yang sejalan dengan pemerintah Inggris, juga Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. ● gul

India Bertekad Bebaskan 8 Warganya yang Dihukum Mati Qatar Akibat Jadi Mata-mata Israel

NEW DELHI (IM) - Menteri Luar Negeri India Subrahmanyan Jaishankar mengatakan India akan melancarkan segala hal untuk membebaskan delapan mantan personel angkatan lautnya yang dilaporkan telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Qatar. Kedelapan individu tersebut dituduh menjadi agen spionase atau mata-mata Israel.

Dalam sebuah keterangan yang diunggah di akun media sosialnya pada Senin (30/10), Jaishankar mengungkapkan, dia telah menemui keluarga dari masing-masing-masing mantan personel angkatan laut. Jaishankar menyampaikan Pemerintah India memberi perhatian besar dan menganggap penting kasus yang dihadapi anggota keluarga mereka di Qatar. "Pemerintah akan terus melakukan segala upaya untuk menjamin pembebasan mereka," ujarnya, dikutip laman Al Arabiya.

Qatar belum mengomentari kasus dugaan spionase Israel yang dilakukan oleh delapan mantan personel angkatan laut India. Doha pun belum secara resmi mempublikasikan dakwaan terhadap mereka.

Kabar hukuman mati yang diterima delapan mantan personel angkatan laut India terungkap pekan lalu. Kementerian Luar Negeri India mengaku terkejut atas kasus tersebut.

Kedelapan warga India yang dikabarkan dijatuhi hukuman mati oleh Qatar adalah karyawan AlDahra. AlDahra adalah perusahaan berbasis di kawasan Teluk yang menawarkan dukungan lengkap untuk sektor kedirgantaraan, keamanan, dan pertahanan. Menurut laporan beberapa media India, kedelapan warga India itu melakukan aksi mata-mata untuk negara ketiga.

Sementara Times of India menyebut, berbagai laporan menyatakan kedelapan mantan personel angkatan laut India itu dituduh melakukan aksi

spionase untuk Israel. Pemerintah Israel belum secara resmi mengomentari kasus ini.

India memiliki hubungan cukup baik dengan Qatar. Doha merupakan pemasok utama gas alam ke India. Lebih dari dua pertiga dari 2,8 juta penduduk Qatar adalah pekerja migran, dan banyak dari mereka adalah warga negara India.

Sebagai sebuah negara di Timur Tengah, Qatar terbilang jarang melakukan eksekusi mati. Mereka sempat menyampaikan bahwa hukuman mati setara dengan hukuman seumur hidup. Menurut Amnesty International, terakhir kali Qatar melaksanakan eksekusi mati adalah pada 2020. Terpidana merupakan seorang pekerja migran asal Nepal.

Eksekusi mati terhadap pekerja migran Nepal itu dilakukan setelah Qatar tak melaksanakan jenis hukuman tersebut selama 20 tahun. ● ans

Layanan Darurat Gaza Berada di Titik Nadir

GAZA (IM) - Pekerja medis di Gaza melakukan pekerjaan ganda menjadi sukarelawan untuk membantu menjalankan layanan darurat yang terbebani oleh serangan Israel. Ambulans berujung untuk mencapai lokasi bom melewati jalan yang dipenuhi puing-puing dan dengan persediaan bahan bakar yang semakin menipis. Staf medis dan darurat telah bekerja dengan sedikit istirahat dan ditempatkan di daerah yang paling berbahaya. Mereka menyaksikan keengerian kematian akibat kekerasan, luka-luka, dan kesedihan yang parah.

Kementerian Kesehatan Gaza pun telah meminta semua paramedis terlatih untuk membantu staf rumah sakit dan tim bantuan dengan puluhan orang telah merespons. Namun sistem tersebut masih sangat membutuhkan lebih banyak pekerja. "Saya belum pulang ke rumah sejak hari pertama perang. Saya mandi di sini, tidur di sini, dan makan di sini," kata Loay al-Astal, seorang pekerja sukarela darurat di Khan Younis, di selatan daerah kantong tersebut.

Relawan yang pernah mengikuti pelatihan di kampus untuk menjadi paramedis menggambarkan sebuah insiden yang membuatnya dan beberapa rekan hampir terbunuh oleh serangan udara yang melanda jenjaka ambulans mereka. "Kacanya pecah dan beberapa relawan kami terluka," ujarnya.

Astal dihantui oleh kenangan saat mencoba menyelamatkan seorang perempuan yang terkubur mencapai lehernya di reruntuhan dari serangan udara. "Ada luka di kepalanya dan saya segera mengobati lukanya," kata pria berusia 33 tahun itu.

Sukarelawan pun membebaskan perempuan itu dari reruntuhan sehingga dia dapat menemukan putranya, hanya saja dia meninggal beberapa menit kemudian dengan kondisi masih terjebak di reruntuhan. "Saya merasa tidak enak karena tidak bisa menyelamatkannya," katanya.

Otoritas kesehatan di daerah kantong yang dikelola Hamas mengatakan, serangan udara dan artileri Israel telah membunuh lebih dari 8.000 orang sejak 7 Oktober. Setelah Israel memulai operasi darat pada hari Jumat, banyak warga Gaza khawatir kehancuran akan semakin parah.

Israel telah memerintahkan warga sipil untuk meninggalkan

bagian utara Jalur Gaza menuju bagian selatan. Namun tentara Israel terus melakukan pemboman intensif di seluruh wilayah kantong tersebut dan banyak orang menolak untuk pergi.

Penembakan di jalan utama utara-selatan Gaza pada Senin (30/10) menunjukkan bahwa daerah kantong itu terbelah menjadi dua. Setiap upaya untuk melarikan diri ke selatan berisiko terkena pemboman. Kementerian Kesehatan mengatakan, 116 staf medis gugur dalam pemboman tersebut sejak 7 Oktober, bersama dengan 18 petugas penyelamat darurat sipil. Kepala layanan ambulans Khan Younis Naseem Hassan mengatakan, departemennya kewalahan dan membutuhkan petugas medis terlatih.

"Kami membuka pintu bagi para sukarelawan dan banyak anak muda yang menjawab panggilan itu dan telah bertugas sejak perang dimulai," kata Haasan.

Bersamaan dengan pemboman tersebut, Israel juga memperlakukan blokade terhadap wilayah kantong yang dihuni 2,3 juta orang, ditambah dengan memutus pasokan listrik dan bahan bakar. Pengiriman bantuan makanan dan medis pun terbatas memasuki Gaza sejak pekan lalu setelah adanya tekanan internasional terhadap Israel.

"Ambulans akan segera berhenti beroperasi karena bahan bakar yang tersisa sangat terbatas. Kami mempunyai masalah dengan komunikasi. Kami kehilangan kontak dengan ambulans yang berangkat dari sini," kata sopir relawan Sari al-Najjar.

Layanan telepon dan internet di Gaza terputus selama hampir dua hari selama akhir pekan ketika tank-tank Israel mulai bergerak ke wilayah Gaza. Komunikasi secara bertahap mulai kembali pada akhir pekan.

Tanpa pasokan listrik yang dapat diandalkan, banyak warga tidak dapat mengisi daya telepon, sehingga menambah kesulitan bagi kru ambulans dalam mencari dan mengoordinasikan penyelamatan. Ribuan orang akhirnya berkumpul di rumah sakit di Kota Gaza, wilayah utara kantong tersebut. Banyak yang berlindung di tenda darurat dengan harapan mendapat keselamatan dari pemboman tersebut. ● gul

Pengadilan Tinggi Jepang Putuskan Korut Melanggar HAM Dengan Janji Palsu

TOKYO (IM) - Pengadilan tinggi Jepang mengatakan pemerintah Korea Utara (Korut) bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap para penggugat yang mengatakan mereka dibujuk untuk pindah ke Korut dengan janji palsu Pyongyang untuk tinggal di "surga di Bumi." Para penyintas korban penipuan ini memuji keputusan tersebut.

"Keputusan tersebut menunjukkan pengadilan Jepang dapat memutuskan pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara, keputusan yang dapat memberikan dampak yang signifikan," kata pengacara dari para penggugat, Kenji Fukuda, Senin (30/10).

Keempat penggugat, termasuk etnis Korea dan Jepang, pindah ke Korut bersama ribuan orang lainnya di bawah program 1959-1984 di mana Korut menjanjikan perawatan kesehatan dan pendidikan gratis, pekerjaan, dan tunjangan lainnya. Namun, mereka mengatakan semua itu tidak tersedia dan mereka sebagian besar ditugaskan untuk melakukan pekerjaan kasar di tambang, hutan, atau pertanian dan dipaksa hidup dalam kondisi yang keras.

Awalnya, lima penggugat mengajukan gugatan pada tahun 2018 ke Pengadilan Distrik Tokyo untuk meminta masing-masing 100 juta yen sebagai kompensasi atas "penipuan dan penahanan ilegal."

Dalam keputusannya Maret 2020 lalu Pengadilan distrik mengakui para penggugat pindah ke Korut karena informasi palsu yang diberikan Korut dan organisasi pro-Korea Utara di Jepang, Chongryon. Namun, putusan tersebut mengatakan kasus itu kedaluwarsa dan pengadilan Jepang tidak memiliki yurisdiksi karena penderitaan para penggugat terjadi di luar Jepang. Empat penggugat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Mereka mengatakan bahwa Jepang memiliki yurisdiksi karena penderitaan para penggugat terjadi di luar Jepang.

Pengadilan Tinggi Tokyo memutuskan pengadilan Jepang memiliki yurisdiksi atas kasus ini dan menemukan pemerintah Korut melanggar hak-hak para penggugat dengan memaksa mereka untuk hidup dalam kondisi yang menyedihkan dan keras, yang sama sekali berbeda dari informasi yang diberikan se-

belum perjalanan mereka.

Pengadilan mengatakan Korut melanggar kebebasan para penggugat untuk memilih tempat tinggal, dan sebagai akibatnya, mereka hampir "dirampas nyawanya."

Pengacara penggugat mengatakan kasus ini sekarang kembali ke Pengadilan Distrik Tokyo, di mana pengadilan akan meninjau sejauh mana kerugian yang harus dibayar pemerintah Korea Utara kepada para penggugat.

Namun, Korut tidak pernah menanggapi gugatan tersebut dan kemungkinan besar tidak akan membayar ganti rugi.

Salah satu penggugat, Eiko Kawasaki, yang kini berusia 81 tahun, berusia 17 tahun ketika dia menaiki kapal ke Korut Utara pada tahun 1960 dan terjebak di sana hingga dia dapat melarikan diri kembali ke Jepang pada tahun 2003. Ia meninggalkan anak-anaknya yang sudah dewasa.

Kawasaki menyeka air matanya dan mengangkat tinjunya sebagai tanda kemenangan di luar pengadilan. Dia kemudian mengatakan keputusan ini adalah kemenangan penuh bagi para korban.

Dalam tayangan di NHK TV, Kawasaki mengatakan dia mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri dari Korut agar dunia tahu tentang program repatriasi Korut dan bahwa "Saya sangat senang bisa kembali ke Jepang dalam keadaan hidup dan menyaksikan putusan hari ini."

Sekitar setengah juta etnis Korea saat ini tinggal di Jepang dan menghadapi diskriminasi di sekolah, di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak di antara mereka adalah keturunan orang Korea yang datang ke Jepang, kebanyakan secara paksa, untuk bekerja di tambang dan pabrik selama penjajahan Jepang di Semenanjung Korea - masa lalu yang masih merenggangkan hubungan antara Jepang dan Korea.

Pada tahun 1959, Korut memulai program pemukiman kembali untuk membawa orang Korea di luar negeri ke Korut untuk menggantikan para pekerja yang terbunuh selama Perang Korea. Pemerintah Jepang, yang memandang etnis Korea sebagai orang luar, menyambut baik program tersebut dan membantu mengatur perjalanan orang-orang ke Korut. Sekitar 93.000 penduduk etnis Korea di Jepang dan anggota keluarga mereka pindah ke Korea Utara. Menurut kelompok yang mendukung para pembelot dari Korea Utara sekitar 150 orang berhasil kembali ke Jepang. ● tom



MALTA AKAN TERUS MENSUBSIDI HARGA ENERGI PADA 2024

Menteri Keuangan Malta, Clyde Caruana mengumumkan rencana anggaran Malta tahun 2024 di parlemen di Valletta, Malta, pada Senin (30/10). Menteri Keuangan Malta berjanji untuk terus mensubsidi harga listrik dan bahan bakar tahun depan. Subsidi ini, ditambah dengan dukungan untuk sereal, biji-bijian, dan pakan ternak, akan berjumlah 350 juta euro (371 juta dolar AS).